

## PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

**Sulastiningsih Sulastiningsih**  
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha  
email: [sulastiningsih@stieww.ac.id](mailto:sulastiningsih@stieww.ac.id)  
**Zaenab Alboneh**  
Prodi Akuntansi STIE Widya Wiwaha

### Abstract

*This research aimed to analyze the influence of budgetary goal characteristics of participation, clarity, feedback and difficulty on the performance accountability of Sleman government. The samples used were 98 respondents. Data collection was carried out by the methods of questionnaire. The questionnaires results were processed by using SPSS Statistics 18. The result showed that budgetary participation and budgetary goal clarity have positive effect on the performance accountability of Sleman government. Meanwhile, the results of budgetary goal difficulty were found that have no effect on the performance accountability of Sleman government.*

**Keywords:** *Budgetary Goal Characteristics, Budgetary Participation, Budgetary Goal Clarity, Budgetary Goal Difficulty, Government Performance Accountability.*

### PENDAHULUAN

Untuk dapat mewujudkan pemerintah yang baik (*good governance*) diperlukan akuntansi sektor publik untuk dapat mewujudkannya. Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut untuk memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah untuk senantiasa tanggap terhadap lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas. Dengan adanya tuntutan yang semakin tinggi tersebut, maka untuk dapat mewujudkan *good governance* setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk membuat sebuah laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dalam satu tahun untuk membuat sebuah laporan pertanggung jawaban atas pencapaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat atas pencapaian kinerja dalam jangka waktu satu tahun dalam menjalankan program atau kegiatan. Di Indonesia, praktik pengukuran kinerja instansi pemerintah telah dilakukan setelah dikeluarkannya Inpres No.7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Instruksi ini menugaskan kepada para pemimpin instansi pemerintah untuk merumuskan suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada masing-masing instansi untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Pengukuran kinerja merupakan proses yang sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Kinerja merupakan gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi.

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR

Meskipun perwujudan dari akuntabilitas kinerja masih jauh dari kata berhasil, namun pemerintah daerah se Indonesia, khususnya pemerintah Kabupaten Sleman telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahannya. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman meraih penghargaan dari KemenPAN-RB atas prestasinya dalam akuntabilitas kinerja dengan predikat sangat baik pada tahun 2016 dan menempati peringkat ke-8 hasil evaluasi kinerja pemerintah daerah tahun 2011 dan diraih 2 (dua) kali secara berturut-turut. Dengan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Sleman merupakan salah satu contoh Pemerintah Daerah yang memiliki kinerja pemerintahan yang baik di Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan pemerintah yang berakuntabilitas, hal ini tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran merupakan elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian dalam mencapai tujuan. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan financial (Mardiasmo, 2006). Dalam akuntansi sektor publik anggaran dipresentasikan dalam APBN dan APBD yang menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2016). Anggaran merupakan elemen penting dalam sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat perencanaan keuangan, tetapi juga dapat digunakan sebagai alat pengendalian, koordinasi, komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi.

Karakteristik tujuan anggaran diharapkan dapat menjadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peningkatan kerja individu pada institusi pemerintah daerah. Menurut (Kenis, 1979) bahwa dalam membuat anggaran pada pemerintah daerah terdapat beberapa karakteristik tujuan anggaran diantaranya partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran,

evaluasi anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran.

Beberapa peneliti telah melakukan penelitian mengenai karakteristik tujuan anggaran yang mempengaruhi kinerja manajerial seperti penelitian terdahulu yang (Ismalia, 2015), (Antara & Rini, 2017) tentang karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara partisipasi anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, hal ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran akan meningkatkan kinerja aparat Pemda. Sedangkan penelitian yang sama juga dilakukan (Ningsih, 2017) yang menunjukkan bahwa partisipasi anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti jika partisipasi aparat Pemda dalam pembuatan anggaran turun maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung jawab tugasnya sehingga dapat meningkatkan kinerja agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan (Ningsih, 2017), (Saukanil, Rasuli dan Darlis 2015), dan (Apriani, Rasuli, dan Taufik, 2016) mengenai karakteristik tujuan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja aparat Pemda, hal ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Seangkan penelitian yang dilakukan (Ismalia, 2015) dan (Antara dan Rini, 2017) menunjukkan hasil yang tidak signifikan. Hal ini berarti bahwa kejelasan sasaran anggaran yang kurang jelas maka kinerja aparat Pemda juga akan turun. Kejelasan sasaran anggaran menyebabkan aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai dimasa datang sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini mengacu

pada penelitian sebelumnya sekaligus mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kenis, 1979) dengan mengganti variabel dependen kinerja manajerial menjadi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan pengaruh partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

## LANDASAN TEORI

### Teori Agensi

Menurut (Jensen & Meckling, 1976) teori agensi merupakan teori yang menggambarkan hubungan antara pihak *principal* dan agen, yaitu antara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Dalam penelitian ini yang dimaksud sebagai agen adalah masyarakat dan *principal* adalah pemerintah. Hubungan agensi terjadi ketika ada pihak *principal* yang menggunakan pihak lain (agen) dengan tujuan untuk mendelegasikan tanggung jawab kepada agen. Hal ini menyebabkan terjadi adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan agen. Pemerintah yang bertindak sebagai agen memiliki lebih banyak informasi mengenai sumber daya dan potensi daerah yang dimiliki dalam bentuk APBD dibandingkan dengan masyarakat yang bertindak sebagai *principal*. Karena adanya perbedaan ini maka pihak agen berkewajiban untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagai pihak *principal* dengan membuat sebuah laporan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja dalam jangka waktu satu tahun yang disebut Laporan Akuntabilitas Kinerja Kinstansi Pemerintah (LAKIP).

Dalam akuntansi manajemen (mekanisme penganggaran) teori agensi juga menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan. Atasan menggunakan anggaran sebagai alat untuk melakukan pengendalian terhadap bawahannya.

### Pengertian Akuntabilitas

Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan laporan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala

aktivitas dan kegiatan kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Pernyataan ini mendukung pernyataan (Mahmudi, 2016) bahwa akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Menurut (Mardiasmo, 2009) Akuntabilitas publik terdiri atas 2 macam, yaitu :

1. Pertanggungjawaban *vertical (vertical accountability)* merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.
2. Pertanggungjawaban *horizontal (horizontal accountability)* merupakan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Dari beberapa pengertian menurut para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban dan menyampaikan hasil kinerja suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau wewenang untuk meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan kegiatan atau program-program pemerintah karena akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

### Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut (Abdul Halim, 2008) kinerja adalah suatu prestasi kerja dan proses penyelenggaraan di mana tujuan organisasi ingin dicapai. Kinerja merupakan prestasi yang berhasil dicapai atau kemampuan kerja seseorang. Dalam organisasi kinerja digunakan untuk dapat melihat berhasil atau

## **PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR**

---

tidaknya tujuan organisasi. Untuk mengetahui pencapaian hasil kinerja harus diketahui oleh pihak tertentu untuk mengetahui bagaimana dampak positif dan negatif dari suatu kebijakan.

Pengukuran kinerja tentunya tidak sebatas pada masalah pemakaian anggaran. Pengukuran kinerja mencakup berbagai aspek sehingga dapat memberikan informasi yang efisien dan efektif dalam pencapaian kinerja tersebut. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran. Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Unit Organisasi dalam mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

### **Anggaran**

Anggaran merupakan elemen penting dalam perencanaan agar dapat melakukan pengendalian dalam mencapai tujuan. Menurut Mardiasmo (2006) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam satuan financial. Dalam akuntansi sektor publik anggaran dipresentasikan dalam APBN dan APBD yang menggambarkan tentang rencana keuangan di masa datang mengenai jumlah pendapatan, belanja, surplus/defisit, pembiayaan, serta program kerja dan aktivitas yang akan dilakukan (Mahmudi, 2016).

### **Tahap Penyusunan Anggaran**

Menurut (Mardiasmo, 2009) menjelaskan tahap anggaran sektor publik sebagai berikut:

#### **1. Tahap Persiapan Anggaran**

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Yang didasari oleh visi, misi, dan tujuan organisasi. Terkait dengan hal tersebut, perlu diperhatikan bahwa sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

#### **2. Tahap Ratifikasi**

Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

#### **3. Tahap Pelaksanaan Anggaran**

Dalam tahap ini yang paling penting adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggungjawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.

#### **4. Tahap Pelaporan dan Evaluasi**

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak masalah.

### **Karakteristik Tujuan Anggaran**

#### **a. Partisipasi Anggaran**

Menurut (Kenis, 1979) partisipasi anggaran mengacu pada sejauh mana manajer berpartisipasi dalam menyiapkan anggaran dan dapat mempengaruhi tujuan pusat pertanggungjawaban mereka. Partisipasi anggaran menunjukkan tingkat pengaruh dan keterlibatan individu dalam proses penyusunan anggaran. Definisi partisipasi dalam anggaran secara terperinci yaitu (1) Sejauh mana anggaran dipengaruhi oleh keterlibatan para pengurus, (2) Alasan-alasan pihak manajer pada saat anggaran diproses, (3) Keinginan memberikan partisipasi anggaran kepada pihak manajer tanpa diminta, (4) Sejauh mana manajer mempunyai pengaruh dalam anggaran akhir, (5) Kepentingan manajer dalam partisipasinya terhadap anggaran, (6) Anggaran didiskusikan antara pihak manajer puncak dengan manajer pusat pertanggungjawaban pada saat anggaran disusun.

b. Kejelasan Sasaran Anggaran

Menurut (Kenis, 1979) kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, dan dapat dimengerti oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaiannya. Menurut (Locke & Lathan, 1984) sasaran adalah apa yang akan dicapai oleh manajer. Sehingga kejelasan sasaran anggaran akan mendorong seorang manajer untuk melakukan yang terbaik dibandingkan dengan sasaran anggaran yang tidak jelas. Tujuan yang dinyatakan tidak jelas dapat menyebabkan kebingungan, ketegangan, dan ketidakpuasan para karyawan. Kejelasan sasaran anggaran diharapkan dapat membantu manajer untuk mencapai tujuan perusahaan sebagaimana yang tercantum dalam perencanaan anggaran, sehingga kinerja dapat tercapai.

(Kenis, 1979) menemukan bahwa manajer memberi reaksi positif dan secara relatif sangat kuat untuk meningkatkan kepuasan kerja, menurunkan ketegangan kerja, dan dapat memperbaiki anggaran yang dihubungkan dengan sikap, kinerja anggaran dan efisiensi biaya manajer tingkat bawah secara signifikan meningkatkan kejelasan dan ketegasan tujuan anggaran mereka.

c. Kesulitan Tujuan Anggaran

Menurut (Kenis, 1979) kesulitan tujuan anggaran menunjukkan seberapa ketat atau seberapa sulit tujuan dapat dicapai. Tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Sedangkan tujuan yang sangat ketat dan tidak dapat dicapai, dapat mengarah pada perasaan gagal, frustrasi, tingkat aspirasi yang rendah, dan tujuan yang partisipan. (Kenis, 1979) mengungkapkan dalam manajer yang memiliki tujuan anggaran yang terlalu ketat secara signifikan memiliki ketegangan kerja tinggi dan motivasi kerja rendah, kinerja anggaran dan efisiensi biaya dibandingkan untuk anggaran memiliki tujuan anggaran tepat atau ketat tetapi dapat dicapai. Hal ini mengidentifikasi bahwa ketat tapi dapat dicapai adalah tingkat kesulitan tujuan anggaran.

## HIPOTESIS PENELITIAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam landasan teori, menurut perspektif teori agensi, anggaran digunakan untuk mengendalikan perilaku bawahan termasuk dalam membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan atau program. Dari teori agensi tersebut dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek penganggaran juga akan mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

### **Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah**

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan, partisipasi anggaran dapat digunakan untuk mengukur kinerja, apabila aparat pemerintah daerah mengerti tentang sejauh mana anggaran dibuat dan sejauh mana aparat tersebut terlibat dalam penyusunan anggaran maka diharapkan aparat tersebut memiliki kinerja yang baik. Dalam penelitian yang dilakukan (Kenis, 1979) mengemukakan bahwa partisipasi penganggaran dapat menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. (Kenis, 1979) juga menemukan bukti bahwa partisipasi penganggaran berpengaruh terhadap kinerja manajerial.

H1: Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman.

### **Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman**

Berdasarkan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara atasan dan bawahan, kejelasan sasaran anggaran dapat mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan program atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi sehingga akan mendorong orang-orang dalam organisasi untuk melakukan yang terbaik untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. (Kenis, 1979)

# **PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR**

menyatakan kejelasan sasaran anggaran menunjukkan luasnya tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas, serta dapat dimengerti oleh orang-orang yang bertanggungjawab atas pencapaiannya.

H2: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman.

## **Pengaruh Kesulitan Tujuan Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah**

Berdasarkan pada teori agensi, kesulitan tujuan anggaran digunakan oleh atasan untuk menunjukkan seberapa ketat atau seberapa sulit tujuan dapat dicapai. (Kenis,1979) menyatakan bahwa tujuan yang mudah dicapai gagal untuk memberikan suatu tantangan untuk partisipan, dan memiliki sedikit pengaruh motivasi. Sedangkan tujuan yang sulit dicapai dapat menimbulkan perasaan gagal dan frustrasi.

H3: Kesulitan Tujuan Anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari hasil pengisian kuesioner oleh responden. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer yaitu data yang berkaitan dengan Partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

### **Populasi dan Sampel**

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman. Populasi dalam penelitian ini meliputi 29 Dinas, Badan dan Inspektorat yang terdapat di wilayah Kabupaten Sleman. Seluruh populasi akan dijadikan sampel dalam penelitian yaitu sebanyak 29 SKPD.

Responden dalam sampel penelitian terdiri dari kepala sub bagian perencanaan, staff bagian perencanaan, kepala sub bagian keuangan, dan staff bagian keuangan dari setiap SKPD. Mereka dipilih karena merupakan aparat pemerintah daerah yang kompeten dalam perencanaan, penyusunan dan pertanggungjawaban terhadap anggaran.

### **Analisis Data**

#### **Statistik Deskriptif**

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah Statistik Deskriptif. Dalam penelitian ini statistik deskriptif digunakan untuk mendefinisikan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Alat analisis yang akan digunakan meliputi rata-rata (mean), maksimum dan minimum, serta standar deviasi. Statistik deskriptif menyajikan ukuran-ukuran numerik yang penting bagi data sampel.

#### **Uji Kualitas Data**

Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier berganda. Ada tiga uji asumsi klasik yang harus dipenuhi dalam uji regresi ini, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, dan uji heteroskedastisitas.

Untuk pengujian instrument penelitian digunakan uji validitas dan reliabilitas data. Uji validitas digunakan untuk mengetahui sah tidaknya suatu kuesioner. Menurut Ghozali (2011) uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Apabila koefisien  $r$  hitung  $<$   $r$  table dengan tingkat signifikansi sebesar 5% atau 0,05 maka dapat dikatakan bahwa butir pernyataan tersebut tidak valid. Sedangkan apabila  $r$  hitung  $>$   $r$  table dengan tingkat signifikansi sebesar 0,05 maka butir pertanyaan tersebut dapat dikatakan valid. Uji reliabilitas adalah alat untuk mengukur keandalan suatu kuesioner.

Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinieritas dan uji heteroskedastisitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variable pengganggu atau residual memiliki data yang terdistribusi normal. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji

apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Sedangkan, Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Metode analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda yang di uji dengan tingkat signifikan 0,05. Model regresi linear berganda dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah

a = Konstanta

b1, b2, b3= Koefisien Regresi

X1 = Partisipasi Anggaran

X2 = Kejelasan Sasaran Anggaran

X3 = Kesulitan Tujuan Anggaran

e = standar error

### Uji Hipotesis

Pengujian uji Statistik F dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Uji t statistik dilakukan untuk menguji pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas secara parsial dengan mengasumsikan bahwa variabel lain dianggap konstan. Tingkat ketepatan suatu garis regresi dapat diketahui melalui besar kecilnya koefisien determinasi atau koefisien R-Square.

Untuk melakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji parsial (uji t). Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, evaluasi anggaran dan kesulitan tujuan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Indikator yang akan dibahas dalam variabel ini yaitu : keterkaitan antara pencapaian kinerja dengan program dan kebijakan, kejelasan sasaran anggaran suatu

program, penetapan visi misi sesuai rencana strategic organisasi, indikator kinerja setiap kegiatan, analisis keuangan kegiatan, pembuatan laporam, pengecekan jalannya program, kegiatan dikontrol dengan indikator kinerja yang jelas, kegiatan disusun untuk megakomodasi masyarakat, dan menyusun LAKIP dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi. Variabel ini diukur dengan instrument dari Anjarwati (2012) dengan pengukuran skala likert 5 (lima) point dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju.

### Identifikasi Variabel

Di bawah ini dijabarkan tentang variabel yang ada, yaitu :

1. Variabel terikat (dependen) adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
2. Variabel bebas 1 (independen) adalah Partisipasi anggaran
3. Variable bebas 2 (independen) adalah kejelasan sasaran anggaran
4. Variable bebas 3 (independen) adalah kesulitan tujuan anggaran

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Objek Penelitian

Sampel pada penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sleman. Hasil dari penelitian yang diperoleh melalui pengumpulan data dari penyebaran kuisisioner menghasilkan data sebagai berikut:

**Tabel 1.  
Jumlah Kuisisioner**

Keterangan	Jumlah Kuisisioner
Kuisisioner yang dikirim	105
Kuisisioner yang tidak direspon	5
Kuisisioner yang tidak dapat digunakan	2
Kuisisioner yang dapat digunakan	98

Sumber: data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa kuisisioner yang dikirim sebanyak 105 kuisisioner. Kuisisioner yang tidak direspon sebanyak 5 kuisisioner dan 2 kuisisioner tidak dapat digunakan karena kuisisioner tidak diisi secara lengkap oleh

**PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI  
TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN  
PIZZA HUT JAKARTA TIMUR**

responden sehingga data tidak dapat digunakan untuk penelitian. Sehingga total kuisisioner yang dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut hanya sebesar 98 kuisisioner. Dari 98 kuisisioner tersebut, terdapat rincian dinas-dinas dimana responden tersebut bekerja sebagai berikut:

**Tabel 2.**  
**Karakteristik Dinas tempat Bekerja**

No	Dinas	Jumlah
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	4
3	Inspektorat Kabupaten	4
4	Dinas Pendidikan	4
5	Dinas Pemuda dan Olahraga	2
6	Dinas Kesehatan	4
7	Dinas Pekerjaan Umum	4
8	Dinas Pertanahan & Tata Ruang	4
9	Satpol PP	3
10	Dinas Sosial	4
11	Dinas Tenaga Kerja	4
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan	2
13	Dinas Pertanian	4
14	Dinas Lingkungan Hidup	3
15	Dinas Kependudukan & Catatan Sipil	3
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat	3
17	Dinas Perhubungan	2
18	Dinas Komunikasi & informatika	4
19	Dinas Penanaman Modal	3
20	Dinas Kebudayaan	4
21	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	3
22	Dinas Pariwisata	4
23	Dinas Perindustrian & Perdagangan	4
24	Dinas Kesatuan Bangsa & Politik	2
25	Dinas UMKM	2
26	BKPP	4
27	BKAD	4
28	BAPPEDA	4
29	BPBD	3

Jumlah	98
--------	----

Sumber: Data primer diolah 2019

**Karakteristik Responden**

Karakteristik responden yang dianalisis dalam penelitian ini meliputi Pendidikan responden, pengalaman kerja, dan jabatan.

**Tabel 3.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Pendidikan terakhir	Frekuensi	Presentase
SLTA	5	5%
D3	12	12%
S1	61	62%
S2	20	20%
Jumlah	98	100%

Sumber: data primer diolah 2019

Dari data yang diperoleh menunjukkan bahwa dari 98 responden 62% responden memiliki tingkat pendidikan strata 1 (S1), 20% responden memiliki tingkat pendidikan strata 2 (S2), 12% berpendidikan D3 dan 5% SLTA. Dari data tersebut mayoritas responden memiliki pendidikan S1, hal ini dapat menunjukkan bahwa sebagian besar responden berkompeten dan bisa diandalkan.

**Tabel 4.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja**

Pengalaman Kerja	Frekuensi	Presentase
3-5 tahun	3	3%
6-10 tahun	17	17%
11-15 tahun	25	26%
> 15 tahun	53	54%
Jumlah	98	100%

Sumber: Data primer diolah 2019

Dari data yang diperoleh table 4.5 menunjukkan bahwa dari 98 responden 54% responden memiliki pengalaman kerja >15 tahun, 26% responden memiliki pengalaman kerja 11-15 tahun, 17% responden memiliki pengalaman kerja 6-10 tahun dan 3% responden memiliki pengalaman kerja 3-5 tahun. Dari data tersebut mayoritas responden memiliki pengalaman kerja diatas 15 tahun dan hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki



pengalaman yang cukup lama dalam menyusun anggaran.

**Tabel 5.**  
**Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan**

Jabatan	Frekuensi	Presentase
Eselon 1	0	0%
Eselon 2	4	4%
Eselon 3	20	20%
Eselon 4	45	46%
Lainnya	29	30%
Jumlah	98	100%

Sumber: data primer diolah 2019

Dari data yang diperoleh tabel 5 menunjukkan bahwa dari 98 responden 46% responden memiliki jabatan eselon 4, 30% responden memiliki jabatan eselon 5, 20% responden memiliki jabatan eselon 3, dan 4% responden memiliki jabatan eselon 2. Hal ini menunjukkan bahwa responden yang berperam dalam penelitian ini memiliki cukup andil dalam proses pengambilan keputusan dalam penganggaran.

**Tabel 6.**  
**Hasil Uji Statistik Deskriptif**  
**Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1	98	15.00	25.00	18.5408	2.10139
X2	98	9.00	15.00	11.8265	1.27648
X3	98	14.00	23.00	18.2755	1.66083
Y	98	32.00	50.00	41.1939	3.28903
Valid N (listwise)	98				

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan pada tabel 6 dapat dipaparkan hasil statistik variabel penelitian sebagai berikut:

1. Pada variabel partisipasi anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 15. Nilai maksimum sebesar 25. Nilai rata-rata sebesar 18.5408 dan nilai standar deviasi sebesar 2.10139 yang berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel partisipasi anggaran sebesar 2.10139 dari 98 responden.
2. Pada variabel kejelasan sasaran anggaran menunjukkan nilai minimum

sebesar 9. Nilai maksimum sebesar 15. Nilai rata-rata sebesar 11.8265 dan nilai standar deviasi sebesar 1.27648 yang berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel partisipasi anggaran sebesar 1.27648 dari 98 responden.

3. Pada variabel kesulitan tujuan anggaran menunjukkan nilai minimum sebesar 14. Nilai maksimum sebesar 23. Nilai rata-rata sebesar 18.2755 dan nilai standar deviasi sebesar 1.66083 yang berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel partisipasi anggaran sebesar 1.66083 dari 98 responden.
4. Pada variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah menunjukkan nilai minimum sebesar 32. Nilai maksimum sebesar 50. Nilai rata-rata sebesar 41.1939 dan nilai standar deviasi sebesar 3.28903 yang berarti bahwa ukuran dari penyebaran data pada variabel partisipasi anggaran sebesar 3.28903 dari 98 responden.

#### Hasil Uji Instrumen Penelitian

#### Uji Validitas

**Tabel 7.**  
**Hasil Uji Validitas**

Variabel	Indikator	Koefisien Korelasi	Nilai Signifikansi	t tabel	Kesimpulan
X1 (Partisipasi Anggaran)	P1	0.746	0.000	0.1986	VALID
	P2	0.639	0.000	0.1986	VALID
	P3	0.793	0.000	0.1986	VALID
	P4	0.684	0.000	0.1986	VALID
	P5	0.659	0.005	0.1986	VALID
X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran)	P1	0.833	0.000	0.1986	VALID
	P2	0.741	0.000	0.1986	VALID
	P3	0.801	0.000	0.1986	VALID
X4 (Kesulitan Tujuan Anggaran)	P1	0.723	0.000	0.1986	VALID
	P2	0.586	0.000	0.1986	VALID
	P3	0.798	0.000	0.1986	VALID
	P4	0.567	0.000	0.1986	VALID
	P5	0.502	0.000	0.1986	VALID
Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi)	P1	0.707	0.000	0.1986	VALID
	P2	0.697	0.000	0.1986	VALID
	P3	0.661	0.000	0.1986	VALID
	P4	0.728	0.000	0.1986	VALID

**PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR**

Pemerintah)	P5	0.642	0.000	0.1986	VALID
	P6	0.713	0.000	0.1986	VALID
	P7	0.785	0.000	0.1986	VALID
	P8	0.855	0.000	0.1986	VALID
	P9	0.585	0.000	0.1986	VALID
	P10	0.791	0.000	0.1986	VALID

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh instrument penelitian > r tabel. Hal ini membuktikan bahwa seluruh instrument penelitian ini valid.

**Uji Reliabilitas**

**Tabel 8.**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Kesimpulan
X1 (Partisipasi Anggaran)	5	0.742	Reliable
X2 (Kejelasan Sasaran Anggaran)	3	0.672	Reliable
X4 (kesulitan Tujuan Anggaran)	5	0.637	Reliable
Y (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)	10	0.894	Reliable

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan table 8 yang telah diolah, menghasilkan Cronbach's Alpha untuk masing-masing sebagai berikut: variabel partisipasi anggaran 0.742, variabel kejelasan sasaran anggaran 0.672, variabel umpan balik anggaran 0.656, variabel kesulitan tujuan anggaran 0.637 dan variabel akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebesar 0.894. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian memiliki cronbach's alpha > 0.60 yang berarti seluruh instrument penelitian reliable.

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Uji normalitas adalah bentuk pengujian untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Model persamaan regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Untuk

mendeteksi data terdistribusi normal menggunakan uji normalitas *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*.

**Tabel 9.**  
**Hasil Uji Normalitas**  
**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

	Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z	1.008
Asymp. Sig. (2-tailed)	.261

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan pada tabel 9 menunjukkan bahwa nilai *Asymp. sig* sebesar 0,261 > 0,05, sehingga menunjukkan data terdistribusi normal.

**Uji Multikolieritas**

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui adanya keterkaitan antara variabel independen dimana variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Untuk mengetahui adanya kolinearitas di dalam penelitian, dapat dilihat dari nilai VIF dan nilai *tolerance*. Regresi dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas apabila nilai VIF < 10 dan nilai toleransi > 0,1. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.11 di bawah ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 10.**  
**Hasil Uji Multikolieritas**

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	<i>Tolerance</i>	VIF	
Partisipasi Anggaran	0.870	1.149	Tidak terdapat multikolinearitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.948	1.055	Tidak terdapat multikolinearitas
Kesulitan Tujuan Anggaran	0.905	1.105	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan data pada tabel 10 dapat diketahui bahwa semua variabel independen yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran memiliki nilai *tolerance* lebih besar daripada 0,1 (*tolerance* > 0,1). Hasil perhitungan menunjukkan bahwa keempat variabel independen memiliki nilai VIF

lebih kecil daripada 10,0 (VIF < 10,0). Dimana partisipasi anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,870 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,149 < 10. Kejelasan sasaran anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,948 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1,055 < 10. Kesulitan Tujuan Anggaran memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,905 > 0,1 dan nilai VIF sebesar 1.105 < 10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian telah memenuhi asumsi klasik dan tidak terdapat multikolinearitas di antara variabel independen di dalam model regresi.

### Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini, untuk menguji adanya heteroskedastisitas menggunakan uji *Glejser* dengan meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji ini adalah jika nilai signifikansi > 0,05 (sig > 0,05), maka tidak terdapat heteroskedastisitas. Hasil uji *Glejser* adalah sebagai berikut:

**Tabel 11.  
Hasil Uji Heteroskedastisitas**

Variabel	<i>t</i>	Sig	Keterangan
Partisipasi Anggaran	1.024	0.308	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kejelasan Sasaran Anggaran	0.547	0.586	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Kesulitan Tujuan Anggaran	0.775	0.440	Tidak terdapat heteroskedastisitas
Dependent Variable: RES2			

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

Berdasarkan dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa data tidak terindikasi adanya heteroskedastisitas pada variabel independen.

### Analisis Regresi Linier Berganda

Pada penelitian ini menggunakan model regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan

kesulitan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan nilai  $\alpha = 5\%$ .

Persamaan regresi dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{AKIP} = 22.296 + 0.397 \text{ PA} + 0.885 \text{ KSA} + 0.058 \text{ KTA} + e$$

Keterangan:

AKIP : Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

PA : Partisipasi Anggaran

KSA : Kejelasan Sasaran Anggaran

KTA : Kesulitan Tujuan Anggaran

e : *Error*

Dari persamaan model regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 22.296 menunjukkan bahwa jika variabel partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, umpan balik anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y sebesar 22.296.
2. Partisipasi anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.397. Dapat diasumsikan bahwa jika variabel independen lain konstan, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan partisipasi anggaran sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.397.
3. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.885. Dapat diasumsikan bahwa jika variabel independen lain konstan, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan partisipasi anggaran sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.885.
4. Kesulitan tujuan anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.058. Dapat diasumsikan bahwa jika variabel independen lain konstan, hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan kesulitan tujuan anggaran sebesar satu satuan maka akuntabilitas kinerja instansi

**PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR**

pemerintah akan mengalami peningkatan sebesar 0.058.

**Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen yaitu pengaruh dari partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Kabupaten Sleman. Untuk mengetahui hasil uji koefisien determinasi, dapat dilihat pada nilai koefisiennya. Jika nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan/atau semakin mendekati angka nol, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi semakin sedikit memberikan kontribusi terhadap variabel dependen. Namun sebaliknya, apabila nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan/atau mendekati angka 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model regresi memberikan kontribusi yang besar dalam menjelaskan variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dapat dilihat pada tabel yaitu sebagai berikut:

**Tabel 12.**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.479	0.229	0.204

Berdasarkan data yang disajikan pada table diatas, hasil uji koefisien determinasi menunjukkan bahwa *Adjusted R<sup>2</sup>* mempunyai nilai sebesar 0.204. Hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu partisipasi anggaran, kejelasan sasaran anggaran, dan kesulitan tujuan anggaran dapat menjelaskan sebesar 20,4 % terhadap variabel konservatisme akuntansi. Selebihnya sebesar 79,6 % dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar model yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

**Pengujian Hipotesis**

**Uji Parsial (Uji t)**

Uji t dilakukan untuk menguji variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

**Tabel 13.**  
**Hasil Uji Parsial (UJI t)**

	Deskripsi	B	Sig	Keputusan
H1	Partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman	0.397	0.010	Diterima
H2	Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman	0.885	0.000	Diterima
H3	Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah kabupaten sleman	0.058	0.758	Tidak Diterima

Sumber: Data primer diolah 2019, SPSS

**Analisis dan Intepretasi Hasil Penelitian**

- 1) Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 13, variabel partisipasi anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.310 dengan nilai signifikansi sebesar 0.041. Koefisien regresi pada variabel partisipasi anggaran signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  karena nilai signifikansi sebesar  $0,041 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi anggaran memiliki arah positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H1 diterima.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif partisipasi anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa peningkatan atas partisipasi aparat Pemda Sleman dalam peyusunan anggaran akan meningkat akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah, sebaliknya jika partisipasi aparat Pemda dalam peyusunan anggaran turun maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah juga akan turun. Semakin tinggi keterlibatan aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran tersebut akan mendorong para aparat untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing tugas yang diembanya sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kenis (1979), yang menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran mampu meningkatkan kinerja manajer dalam pelaksanaan anggarannya.

2) Pengaruh Kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.768 dengan nilai signifikansi sebesar 0.001. Koefisien regresi pada variabel kejelasan sasaran anggaran signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  karena nilai signifikansi sebesar  $0.001 < 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan ssasaran anggaran memiliki arah positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H2 diterima.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif kejelasan sasaran anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah, hal ini berarti bahwa semakin jelas kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan anggaran maka semakin tinggi akuntabilitas kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, sebaliknya jika kejelasan sasaran anggaran kurang jelas maka akuntabilitas kinerja aparat Pemda juga akan turun. Sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas, spesifik, dan mudah dipahami dapat meningkatkan kinerja aparat karena aparat pemerintah daerah semakin mengerti target-target yang akan dicapai sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Kenis (1979) yang menjelaskan bahwa kejelasan sasaran anggaran memiliki pengaruh positif terhadap kinerja manajerial.

3) Pengaruh kesulitan tujuan anggaran terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.15 variabel partisipasi anggaran mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0.058 dengan nilai signifikansi sebesar 0.758. Koefisien regresi pada variabel kesulitan tujuan anggaran tidak signifikan pada tingkat signifikansi  $\alpha = 5\%$  karena nilai signifikansi sebesar  $0.758 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan tingkat kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman atau H3 tidak diterima.

Kesulitan tujuan anggaran tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dikarenakan rendahnya persepsi aparat pemerintah daerah tentang kesulitan tujuan anggaran, sehingga sulit atau tidaknya tujuan anggaran tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pencapaian tujuan anggaran. Semakin tinggi kesulitan tujuan anggaran yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah maka akan semakin susah untuk mencapai kinerja aparat pemerintah daerah yang ingin dituju dan sebaliknya jika terlalu rendah kesulitan yang dihadapi aparat daerah tersebut mereka tidak merasa tertantang untuk mencapai hasilnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Kenis (1979) yang menyimpulkan bahwa kesulitan tujuan anggaran tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja manajer.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji t, dan uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) serta pembahasan yang telah

## PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PIZZA HUT JAKARTA TIMUR

dilakukan, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa partisipasi anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Semakin tinggi partisipasi anggaran maka akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
2. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Semakin jelas suatu anggaran akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
3. Hasil penelitian ini gagal membuktikan bahwa kesulitan tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah Kabupaten Sleman. Hal ini dikarenakan rendahnya persepsi aparat pemerintah daerah tentang kesulitan tujuan anggaran, sehingga sulit atau tidaknya tujuan anggaran tidak dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

### Keterbatasan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian ini antara lain:

1. Responden dalam penelitian ini hanya terbatas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Sleman
2. Berdasarkan model penelitian, faktor dalam penelitian ini yang mempengaruhi hubungan antara karakteristik tujuan anggaran dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah hanya 21,6% sehingga terdapat 78,4% faktor lain yang dapat mempengaruhi hubungan tersebut diluar penelitian ini.

### Saran

1. Jumlah sampel dalam penelitian berikutnya dapat diperluas untuk mendapat hasil yang lebih digeneralisasi. Misalnya dengan memperluas objek penelitian.

2. Pembuatan instrument penelitian dapat dikembangkan lagi supaya instrument tersebut dapat mewakili data responden.

### DAFTAR REFERENSI

- Anjarwati, Mei. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal* 3 (1): 1-7.
- Apriani, Aulia dan Taufik. (2016). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Kota Pekanbaru dengan Sikap Aparat Pemerintah Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi*, Vol.4, No.2.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2008. *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Inpres Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Ismalia, Haryanti. (2015). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran dan Pengendalian Internal terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kampar). *Jurnal FEKON*.
- Jansen & Meckling. (1976). The Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial and Economics*. 3:305-360.
- Kenis, Izettin. (1979). Effects of Budgetary Goals Characteristics on managerial Attitudes and Performance. *The Accounting Review*.
- Locke, E., Lathan. (1984). *Goal Setting A Motivational Technique That Works. Practice Hall*. Inc Englewood, New Jersey
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi offset
- Ningsih, Y.I. (2017). Pengaruh Karakteristik Penganggaran, Penerapan Sistem Informasi Akuntansi dan Akuntabilitas Publik terhadap Kinerja Manajerial SKPD Kabupaten Batanghari. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  
Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  
Akuntansi Pemerintahan.

Saukani, Rasuli. M. dan Edfan. (2015).  
Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran  
terhadap Kinerja Manajerial dengan  
Motivasi sebagai Variabel Intervening pada  
Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin.  
*Jurnal SOROT, Volume 10 hal 179 – 193.*

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian  
Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung:  
Alfabeta.

